

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 1958  
TENTANG  
PELAKSANAAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN PERBURUHAN (UNDANG-UNDANG NO. 22  
TAHUN 1957, LEMBARAN-NEGARA NO. 42 TAHUN 1957)

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan peralihan mengenai perselisihan perburuhan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-undang No.22 tahun 1957), berada ditangan Pegawai, Panitia Daerah dan Panitia Pusat menurut Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951.

Mengingat

- a. Pasal 31 Undang-undang tentang penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Undang-undang No.22 tahun 1957);
- b. Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 18 Maret 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PELAKSANAAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG TENTANG  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

sebagai berikut:

Pasal 1.

Perselisihan Perburuhan yang pada waktu Undang-undang No.22 tahun 1957 mulai berlaku, sudah ada ditangan pegawai termaksud pada pasal 2 dari Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951, penyelesaiannya dilanjutkan oleh pegawai termaksud pada pasal 3 Undang-undang No.22 tahun 1957.

Pasal 2.

Perselisihan Perburuhan yang pada waktu Undang-undang No. 22 tahun 1957 mulai beriak, sudah ada ditangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, termaksud pada pasal 3 dan pasal 16 dari Undang-undang Darurat No.16 tahun 1951, penyelesaian dilanjutkan oleh masing-masing Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan,

termaksud pada pasal 5 dan pasal 12 dari Undang-undang No.22 tahun 1957.

### Pasal 3

Jika pada waktu Undang-undang No.22 tahun 1957 mulai berlaku, pihak yang hendak mengadakan tindakan telah memberitahukan maksudnya kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah termaksud pada pasal 4 Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951, akan tetapi tindakan itu belum boleh dilakukan karena belum memenuhi syarat tentang waktu tiga minggu, termaksud pada pasal 4 tersebut, maka pemberitahuan itu dianggap sebagai pemberitahuan termaksud pada pasal 6 Undang-undang No.22 tahun 1957.

Pemberitahuan itu dianggap dilakukan pada saat Undang-undang No.22 tahun 1957 mulai berlaku.

### Pasal 4.

Jika pada waktu Undang-undang No.22 tahun 1957 mulai berlaku, sedang diadakan enquete termasuk pada pasal 10 Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951, maka enquete itu untuk selanjutnya dianggap sebagai enquete itu untuk selanjutnya dianggap sebagai enquete yang diadakan berdasarkan pasal 18 Undang-undang No.22 tahun 1957.

### Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 2 April 1958.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Perburuhan,

ttd.

SAMJONO

Diundangkan  
pada tanggal 15 April 1958.  
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 36